

ABSTRACT

The Role of Indonesian Government in the Management of Indonesian Migrant Workers' Remittances: Justification and Restriction

By:

Annisa Ayuningtyas, S.H.*

Indonesian government obligation to give an economic protection towards Indonesian Migrant Workers (IMWs) through remittance management by involving banks or non-bank financial institutions within the state and the placement state – imposed by Law 18/2017 – triggers a question on whether such remittance management can really be conducted and how this will be conducted because neither further provision nor explanation provided in the law; there is still a legal vacuum on the implementing regulation; the impact of migrant workers' remittances are conditional; and remittance is actually a private household transfer thus Indonesia is just bypassed as a consequence that the receiver is within Indonesia's jurisdiction. This is a doctrinal legal research aiming to understand IMWs' remittances from the administrative law perspective by analyzing the justification of such obligation and the extent to which such remittance management is enabled. The data are obtained from (1) normative resources mostly in the form of statutory laws on the protection of IMWs, state finance, etc.; (2) authoritative sources in the form of scholarly legal writings; and (3) additional resources in the form of documents and non-legal writings. First, this thesis found that in the sense migrant workers' remittance is a component of secondary income in the balance of payment that can be included in the national income calculation while (1) national income is unidentified in Indonesian statutory laws; and (2) the provisions of state intervention on economic resources allocation in the 1945 Constitution merely encompasses natural resources and important sectors of production – hence IMWs deployment abroad is a form of state intervention on human resources lacking of the constitutional basis – the most plausible justification for this intervention is that Indonesia is a welfare state existing in the global political economy increasingly interdependent yet divided into zones of sharply disparate nuance, while the lack of employment within the state has been a persistent problem. Government function expansion hence needed, and people's approval required for a welfare state's government intervention has been fulfilled since 1997 – for IMWs deployment overseas – and 2017 – for government intervention on IMWs' remittances – through the inclusion in the legislation. Second, this thesis found that (1) the private nature of migrant workers' remittances appears to be the natural restriction leading to the stages of remittance management Indonesian government might intervene as well as the degree of accessibility; (2) the relation between Indonesian government and institutions related to IMWs' remittances within the state and the placement state bot the state-owned and the private-owned appears to be the technical restriction;

and (3) the intention to give economic protection appears to be the ultimate restriction.

Keywords: Remittance Management; Indonesian Migrant Workers; Indonesian Government

* LLM Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: annisakuswinhartomo@gmail.com.

INTISARI

Peran Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Remitansi Pekerja Migran Indonesia: Justifikasi dan Restriksi

Oleh:

Annisa Ayuningtyas, S.H.*

Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pengelolaan remitansi dengan melibatkan bank atau lembaga keuangan non-bank di dalam negeri maupun di luar negeri – sebagaimana dibebankan oleh UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia – memicu pertanyaan mengenai apakah pengelolaan semacam ini benar-benar dapat dilakukan dan bagaimana hal ini akan dilakukan mengingat tidak ada ketentuan maupun penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut; ada kekosongan hukum dalam tataran peraturan implementatif; dampak remitansi pekerja migran sebenarnya kondisional; dan remitansi merupakan transfer privat sehingga Indonesia sebenarnya hanya dilewati sebagai konsekuensi bahwa penerima remitansi ada dalam yurisdiksi Indonesia. Tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk memahami remitansi PMI dari perspektif hukum administrasi negara dengan menganalisis justifikasi atas kewajiban tersebut dan batasan hingga sejauh mana pengelolaan remitansi tersebut dapat dilakukan. Data dikumpulkan dari (1) sumber normatif utamanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan PMI, keuangan negara, dll; (2) sumber autoritatif dalam bentuk tulisan ilmiah hukum; dan (3) sumber tambahan dalam bentuk dokumen dan tulisan non-hukum. Pertama, tesis ini menemukan bahwa dalam hal remitansi pekerja migran adalah sebuah komponen pendapatan sekunder dalam neraca pembayaran yang dapat dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional sedangkan (1) pendapatan nasional tidak teridentifikasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; dan (2) ketentuan tentang intervensi negara terhadap alokasi sumber daya ekonomi dalam UUD 1945 hanya mencakup sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang penting – sehingga penempatan PMI di luar negeri sebagai bentuk intervensi negara terhadap sumber daya manusia tidak memiliki dasar konstitusional – justifikasi yang paling memungkinkan adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang ada dalam ekonomi politik global yang semakin saling tergantung namun terbagi dalam zona dengan perbedaan yang tajam, sementara kurangnya lapangan kerja di dalam negeri telah menjadi masalah yang tidak kunjung hilang. Perluasan fungsi pemerintah oleh karenanya dibutuhkan, dan persetujuan rakyat sebagaimana dipersyaratkan untuk intervensi pemerintah sebuah negara kesejahteraan telah dipenuhi sejak 1997 – untuk penempatan PMI di luar negeri – dan 2017 – untuk intervensi pemerintah terhadap remitansi PMI – melalui dimasukkannya hal-hal tersebut di dalam undang-undang. Kedua, tesis ini menemukan bahwa (1) karakter privat remitansi pekerja migran muncul sebagai batasan alami yang berujung pada tahap pengelolaan remitansi PMI di mana pemerintah Indonesia dapat melakukan intervensi, termasuk derajat aksesibilitasnya; (2) hubungan antara pemerintah Indonesia dengan

lembaga-lembaga yang berkaitan dengan remitansi PMI, baik di dalam maupun di luar negeri, baik milik negara maupun milik swasta, muncul sebagai batasan teknis; dan (3) maksud untuk memberikan perlindungan ekonomi muncul sebagai batasan pokok.

Kata kunci: Pengelolaan Remitansi; Pekerja Migran Indonesia; Pemerintah Indonesia

* Mahasiswa LLM Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: annisakuswinhartomo@gmail.com.